PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Analisis Praktik Birokratis dan Ketimpangan Ekonomi dalam Program Beasiswa Sidoarjo

Egi Putra Imawan[1], Amin Tohari[2]
[1] Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
[2] Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: egiputra2424@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 1th, 2026
Revised Nov 11th, 2026
Accepted Nov 19th, 2026

Keyword:
Beasiswa daerah; Birokrasi; Ketimpangan sosial; Mobilitas sosial; Pendidikan tinggi.

ABSTRAK

Program beasiswa daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong mobilitas sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik birokrasi dalam pengelolaan seleksi beasiswa serta mengkaji sejauh mana program tersebut mampu menjembatani ketimpangan ekonomi mahasiswa. Penelitian dilakukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif selama masa magang dan studi dokumentasi terhadap berkas administrasi, regulasi, serta informasi resmi terkait program beasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan beasiswa telah mencerminkan rasionalitas formal birokrasi melalui prosedur yang sistematis, terstandar, dan impersonal, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Weberian. Namun demikian, kompleksitas persyaratan administratif dan kebutuhan akan akses sumber daya tertentu masih menjadi hambatan bagi sebagian mahasiswa, khususnya dari kelas sosial ekonomi bawah. Dari perspektif Marxian, kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap program beasiswa tidak sepenuhnya terlepas dari kepemilikan modal ekonomi, sosial, dan kultural. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara sistem birokrasi yang menekankan keteraturan prosedural dengan realitas sosial yang masih diwarnai ketimpangan akses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program beasiswa memiliki peran penting sebagai instrumen mobilitas sosial di Kabupaten Sidoarjo, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif. Integrasi antara ketegasan aturan birokrasi dan sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi saat ini dipandang sebagai instrumen kunci dalam mendorong mobilitas sosial, khususnya di era industrialisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan. Pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi individu tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan status sosial ekonomi melalui akses ke pekerjaan yang lebih layak dan bergaji lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan kontribusi signifikan terhadap mobilitas sosial vertikal dalam masyarakat modern (Habib dkk., 2024). Pendidikan juga dipandang sebagai instrumen mobilitas sosial yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Tohari, 2022).

Namun, akses ke pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Latar belakang keluarga, tingkat pendapatan,

dan pendidikan orang tua merupakan faktor penting yang memengaruhi partisipasi individu dalam pendidikan tinggi (Muslimin & Asiah, 2024). Ketidaksetaraan ini berpotensi menghambat mobilitas sosial, karena tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Nudin, 2025). Selain itu, komersialisasi pendidikan tinggi telah memperlebar kesenjangan akses karena meningkatnya biaya pendidikan, sehingga pendidikan tinggi menjadi lebih eksklusif bagi kelompok-kelompok tertentu (Handayani & Ibrahim, 2024).

Secara lokal, Kabupaten Sidoarjo, zona penyangga bagi wilayah metropolitan Surabaya, mengalami dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang pesat, khususnya di sektor industri. Perkembangan ini telah mendorong perubahan dalam struktur sosial masyarakat, termasuk peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja terdidik. Transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri telah menyebabkan peningkatan aspirasi untuk pendidikan tinggi sebagai sarana untuk meningkatkan standar hidup (Sinta, 2023). Lebih lanjut, tingginya jumlah mahasiswa di Sidoarjo juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah melalui program beasiswa pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa daerah memiliki dampak positif pada kompetensi mahasiswa dan motivasi belajar, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas lulusan (Achmad dkk., 2024).

Dengan demikian, pendidikan tinggi memainkan peran strategis dalam mempromosikan mobilitas sosial di era industri, khususnya di zona penyangga seperti Sidoarjo. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pendidikan tinggi berkontribusi pada mobilitas sosial dalam konteks lokal dan nasional. Peluncuran program beasiswa daerah merupakan salah satu bentuk respons pemerintah untuk mengatasi meningkatnya beban biaya pendidikan tinggi yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks daerah, program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan keuangan tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk memperluas akses pendidikan dan mendorong mobilitas sosial. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, berupaya menerapkan kebijakan yang menjangkau siswa dari berbagai latar belakang ekonomi.

Namun, implementasi program beasiswa tidak terlepas dari dinamika birokrasi yang kompleks. Berdasarkan pengamatan selama magang di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, sebuah fenomena dapat digambarkan sebagai "pusaran" aktivitas administrasi. Aktivitas ini meliputi proses seleksi, verifikasi berkas, dan pengambilan keputusan, yang melibatkan berbagai tahapan dan aktor birokrasi. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dipengaruhi oleh praktik administrasi di lapangan.

Dari perspektif sosiologis, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan kerangka kerja birokrasi Max Weber, yang menekankan rasionalitas, aturan formal, dan hierarki organisasi. Di sisi lain, efektivitas program beasiswa dalam mengurangi kesenjangan sosial juga dapat diteliti melalui perspektif Karl Marx, yang melihat hubungan antara struktur ekonomi dan akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik birokrasi dan realitas ekonomi masyarakat berinteraksi dalam implementasi program beasiswa daerah. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini merumuskan masalah yang berkaitan dengan praktik birokrasi dalam mengelola seleksi beasiswa dan sejauh mana program tersebut mampu menjembatani kesenjangan ekonomi antara siswa dari berbagai kelas sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persimpangan antara sistem regulasi pemerintah dan realitas ekonomi masyarakat dalam implementasi program beasiswa daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan konteks terjadinya. Pendekatan ini dipilih karena secara komprehensif menggambarkan praktik birokrasi dalam pengelolaan program beasiswa daerah di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan selama magang, memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kegiatan administrasi dan memperoleh pemahaman empiris tentang proses seleksi beasiswa. Observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial secara lebih alami dan mendalam (Moleong, 2021). Selanjutnya, data dikumpulkan melalui studi

dokumenter, meliputi persyaratan administrasi, laporan resmi, dan peraturan terkait program beasiswa daerah, yang berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian (Creswell, 2018).

Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini mengacu pada model analisis interaktif yang menekankan keterkaitan berkelanjutan dari tahapan analisis (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologis untuk meneliti hubungan antara praktik birokrasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi program beasiswa daerah.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, membandingkan data observasional dan data terdokumentasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas Formal dalam Manajemen Beasiswa

Pengelolaan program beasiswa di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bagaimana mekanisme birokrasi dijalankan melalui serangkaian aturan, prosedur, dan ketentuan administratif yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, proses pengelolaan beasiswa memperlihatkan bahwa tahapan seleksi sangat bergantung pada kelengkapan dan validitas dokumen yang diserahkan oleh calon penerima beasiswa. Dokumen administratif menjadi salah satu dasar utama dalam proses pemeriksaan dan penilaian peserta, sehingga setiap persyaratan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program beasiswa tidak hanya berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga melibatkan sistem administrasi yang mengatur setiap tahapan pelaksanaannya agar berjalan secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Praktik tersebut mencerminkan konsep rasionalitas formal dalam pemikiran Max Weber, yaitu suatu bentuk tindakan birokrasi yang mengutamakan aturan tertulis, prosedur yang sistematis, serta pertimbangan yang bersifat objektif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif Weber, birokrasi modern dibangun melalui pembagian tugas yang jelas, hierarki kewenangan, serta penerapan aturan yang berlaku secara konsisten. Dengan demikian, keputusan dalam organisasi birokrasi idealnya tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, maupun pertimbangan yang bersifat emosional, melainkan mengacu pada ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Karakteristik tersebut dapat ditemukan dalam proses seleksi penerima beasiswa yang menempatkan persyaratan administratif sebagai instrumen untuk menentukan kesesuaian peserta dengan kriteria program (Weber, 1978; Ritzer, 2021; Giddens, 2013).

Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem verifikasi berlapis juga menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program beasiswa. Melalui prosedur tersebut, setiap berkas calon penerima diperiksa menggunakan ketentuan yang relatif sama, sehingga proses seleksi memiliki dasar penilaian yang lebih terstruktur. Mekanisme ini sekaligus berfungsi untuk mengurangi kemungkinan munculnya praktik subjektif, seperti pemberian perlakuan khusus karena kedekatan pribadi, hubungan keluarga, ataupun pengaruh pihak tertentu. Dalam konteks tersebut, prinsip ketidakpribadian (*impersonality*) menjadi unsur penting dalam birokrasi karena menempatkan aturan sebagai dasar hubungan antara penyelenggara program dan masyarakat. Artinya, setiap calon penerima beasiswa seharusnya memperoleh perlakuan yang setara tanpa dipengaruhi oleh identitas maupun hubungan personal dengan pihak penyelenggara. Prinsip ini diperlukan agar pelaksanaan seleksi dapat berlangsung secara adil dan tidak bergantung pada kepentingan individu tertentu (Blau & Meyer, 2003; Albrow, 1996).

Selain itu, penerapan sistem penilaian berbasis poin dan validasi data secara digital menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan rasionalisasi dalam pengelolaan administrasi publik. Penggunaan sistem tersebut memungkinkan proses pemeriksaan dan penilaian dilakukan melalui indikator yang lebih terukur, sehingga penyelenggara memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan kelayakan calon penerima beasiswa. Digitalisasi administrasi juga dapat membantu proses pengelolaan data, mengurangi ketergantungan terhadap pemeriksaan secara manual, serta meningkatkan keteraturan dalam penyimpanan dan pencocokan dokumen. Dalam birokrasi modern, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem kerja yang lebih terintegrasi dan terstandarisasi. Dengan demikian, sistem poin dan

validasi digital tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis, tetapi juga mencerminkan perkembangan tata kelola birokrasi yang semakin mengandalkan data, pengukuran, dan prosedur formal dalam pelaksanaan kebijakan publik (Dunleavy et al., 2006; Margetts, 2011).

Namun, penerapan mekanisme birokrasi yang terstruktur tersebut tidak selalu menghasilkan proses pelayanan yang sepenuhnya efektif. Dalam praktiknya, prosedur administratif yang terlalu rinci dan persyaratan dokumen yang beragam berpotensi menimbulkan hambatan bagi calon penerima beasiswa. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan magang, proses pemenuhan persyaratan administratif dapat menuntut calon peserta untuk menyediakan waktu dan tenaga tambahan, terutama ketika terdapat dokumen yang belum lengkap, tidak sesuai dengan ketentuan, atau memerlukan proses perbaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa calon penerima beasiswa tidak hanya dituntut memenuhi kriteria substantif sebagai penerima bantuan pendidikan, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme administratif yang telah ditentukan oleh penyelenggara program. Akibatnya, perhatian peserta dapat lebih banyak tersita untuk menyelesaikan berbagai persyaratan administratif dibandingkan memahami substansi dan tujuan dari program beasiswa itu sendiri.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan ideal birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang tertib dan objektif dengan pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan prosedur administratif. Di satu sisi, kelengkapan dokumen dan proses verifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria. Akan tetapi, di sisi lain, prosedur yang terlalu kompleks dapat menciptakan beban administratif yang tidak sederhana bagi masyarakat. Situasi ini dapat dikaitkan dengan konsep *sangkar besi* (*iron cage*) dalam pemikiran Weber, yang menggambarkan kondisi ketika kehidupan manusia semakin terikat oleh sistem rasionalitas, aturan, dan prosedur formal. Rasionalitas yang pada awalnya dibentuk untuk menciptakan keteraturan justru dapat membatasi ruang gerak individu ketika penerapannya terlalu kaku dan tidak memberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan kondisi tertentu. Dalam konteks pengelolaan beasiswa, calon penerima dapat berada dalam posisi yang mengharuskannya mengikuti seluruh ketentuan administratif, meskipun dalam situasi tertentu persyaratan tersebut dirasakan memberatkan. Dengan demikian, birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga dapat menjadi sistem yang membatasi fleksibilitas masyarakat dalam mengakses pelayanan publik (Weber, 1978; Giddens, 2013; Ritzer, 2021).

Dalam kajian administrasi dan kebijakan publik, kondisi tersebut juga dapat dipahami melalui fenomena birokratisasi berlebihan, yaitu ketika prosedur dan mekanisme administratif berkembang menjadi rangkaian persyaratan yang justru berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama suatu kebijakan. Prosedur yang seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan program dapat berubah menjadi beban tersendiri apabila tidak disertai pertimbangan terhadap kemudahan akses dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan program beasiswa tidak cukup hanya diukur melalui kepatuhan terhadap SOP dan ketepatan pemeriksaan dokumen, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan tidak menciptakan hambatan administratif yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penerapan aturan formal dengan fleksibilitas pelayanan agar prinsip akuntabilitas dan objektivitas tetap terjaga tanpa mengabaikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh hak atas akses pendidikan. Persoalan ini menunjukkan bahwa efektivitas birokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya prosedur yang diterapkan, melainkan juga oleh sejauh mana prosedur tersebut mampu mendukung tujuan kebijakan secara nyata (Hood, 1991; Bevir, 2010).

Kontestasi Kelas dalam Memperebutkan Akses (Perspektif Marxian)

Berdasarkan sudut pandang Karl Marx, akses terhadap beasiswa tidak bisa dilepaskan dari struktur kelas sosial yang membentuk peluang individu. Dalam praktiknya, kemampuan mahasiswa untuk memenuhi persyaratan administratif sangat dipengaruhi oleh kepemilikan sumber daya. Mahasiswa dengan akses terhadap teknologi, informasi, dan dukungan finansial cenderung lebih siap menghadapi proses seleksi dibandingkan mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi terbatas (Bourdieu, 1986; Reay, 2017; OECD, 2022). Konsep modal yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu membantu menjelaskan fenomena ini. Modal ekonomi, sosial, dan kultural tidak hanya berpengaruh pada capaian pendidikan, tetapi juga menentukan kemampuan individu dalam mengakses program bantuan (Bourdieu, 1986; Marginson, 2016). Dalam konteks Indonesia, ketimpangan akses pendidikan tinggi juga masih menjadi isu yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan

rendah (World Bank, 2020; BPS, 2023). Di sisi lain, program beasiswa tetap memiliki potensi sebagai instrumen mobilitas sosial. Bantuan pendidikan dapat membuka peluang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana program tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan (Tilak, 2020; Unterhalter, 2019). Jika tidak, maka beasiswa berisiko hanya menjadi bantuan sementara tanpa mengubah struktur ketimpangan yang ada. Relasi kuasa juga tampak dalam proses ini. Negara melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo memiliki otoritas dalam menentukan kriteria penerima dan mekanisme distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu melibatkan proses seleksi yang tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan dan struktur kekuasaan (Harvey, 2020; Scott, 1998; Foucault, 1980).

Jika kedua perspektif Max Weber dan Karl Marx dipertemukan, maka terlihat bahwa implementasi program beasiswa tidak hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut berinteraksi dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan pengalaman selama magang di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, proses administrasi beasiswa menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan prosedural dan realitas yang dihadapi mahasiswa. Di satu sisi, birokrasi yang dijalankan sudah mengikuti prinsip rasionalitas formal. Setiap berkas diperiksa secara teliti, mulai dari kelengkapan dokumen, keabsahan data, hingga kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini memang penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menghindari praktik penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, petugas sering kali harus bekerja secara sistematis dan berulang untuk memastikan bahwa seluruh data yang masuk telah diverifikasi dengan benar. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa birokrasi modern bertumpu pada aturan formal dan prosedur yang terstandar (Weber, 1978; Ritzer, 2021).

Namun di sisi lain, pengalaman lapangan juga menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa berada dalam posisi yang sama dalam menghadapi tuntutan administratif tersebut. Beberapa mahasiswa terlihat kesulitan dalam melengkapi dokumen, baik karena keterbatasan akses teknologi, kendala biaya, maupun kurangnya informasi. Misalnya, terdapat mahasiswa yang harus bolak-balik mengurus berkas karena kesalahan kecil dalam administrasi, sementara yang lain dapat menyelesaikan proses dengan lebih cepat karena memiliki fasilitas yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur yang sama dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda bagi individu dengan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda (Bourdieu, 1986; Reay, 2017).

Dalam situasi ini, "kesibukan administratif" yang terjadi di kantor tidak hanya mencerminkan rutinitas birokrasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara sistem dan masyarakat. Petugas tidak jarang dihadapkan pada dilema antara mengikuti aturan secara ketat atau memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Di sinilah terlihat bahwa birokrasi tidak selalu bersifat kaku, tetapi juga melibatkan pertimbangan sosial dalam praktiknya (Lipsky, 2010; Bevir, 2010). Lebih jauh, jika dilihat dari perspektif ketimpangan sosial, proses administrasi yang kompleks dapat menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiswa dari kelas ekonomi bawah. Meskipun program beasiswa bertujuan untuk membantu mereka, kenyataannya akses terhadap program tersebut masih dipengaruhi oleh kepemilikan modal baik ekonomi, sosial, maupun kultural (Marginson, 2016; OECD, 2022). Dengan kata lain, tanpa disadari, sistem yang ada berpotensi mereproduksi ketimpangan yang justru ingin diatasi.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa program beasiswa tetap memiliki dampak positif. Banyak mahasiswa yang terbantu secara finansial dan dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih tenang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tetap memiliki peran penting sebagai instrumen mobilitas sosial, meskipun implementasinya masih perlu disempurnakan (Tilak, 2020; World Bank, 2020). Dengan demikian, sintesis antara dua perspektif ini menunjukkan bahwa efektivitas program beasiswa tidak hanya ditentukan oleh ketatnya aturan, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri dengan tingkat kebutuhan pendidikan yang tinggi, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif agar kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Program beasiswa daerah yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam merespons tingginya beban biaya

pendidikan sekaligus mendorong mobilitas sosial masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, praktik birokrasi dalam pengelolaan beasiswa telah menunjukkan penerapan rasionalitas formal melalui prosedur yang terstruktur, sistem verifikasi yang ketat, serta upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mencerminkan karakter birokrasi modern yang menekankan pada aturan dan standar operasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, sistem tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perbedaan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa. Kompleksitas administrasi justru berpotensi menjadi hambatan bagi kelompok tertentu yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program beasiswa memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan, dalam beberapa kondisi sistem yang ada masih merefleksikan ketimpangan tersebut.

Di sisi lain, program beasiswa tetap memberikan dampak positif sebagai instrumen bantuan pendidikan dan peluang mobilitas sosial, terutama bagi mahasiswa yang berhasil mengaksesnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan antara ketegasan aturan birokrasi dengan fleksibilitas dalam memahami kondisi lapangan. Dengan demikian, efektivitas program tidak hanya diukur dari kelancaran administratif, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjangkau dan memberdayakan kelompok yang paling membutuhkan di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, D., Pradana, G. W., Ma'ruf, M. F., & Megawati, S. (2026). Pengaruh kualitas pelayanan program beasiswa pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan motivasi belajar terhadap kompetensi mahasiswa: Studi pada penerima beasiswa tahun 2024. *Publika, 14*(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/75357

Bevir, M. (2010). *Democratic governance*. Princeton University Press.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (hlm. 241–258). Greenwood Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Habib, A., dkk. (2024). Perubahan sosial dan mobilitas mahasiswa di era industri. *Jurnal Multidisiplin, 5*(1), 45–53.

Handayani, S., & Ibrahim, R. (2025). Neoliberalisme dan komersialisasi pendidikan tinggi: Ancaman mobilitas sosial di Indonesia. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, 7*(2). https://doi.org/10.31958/istinarah.v7i2.15881

Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.

Marginson, S. (2016). *Higher education and the common good*. Melbourne University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Muslimin, A., & Asiah, N. (2024). Pengaruh latar belakang sosial ekonomi terhadap partisipasi pendidikan tinggi. *Jurnal Pilar, 9*(2), 88–97.

Nudin. (2025). Dampak kesenjangan akses pendidikan tinggi terhadap mobilitas sosial. *Jurnal Mitra, 23*(1), 1–10. https://kopertais8.or.id/jurnal/index.php/jm/article/view/77

OECD. (2022). *Education at a glance 2022: OECD indicators*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/3197152b-en

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2024). *Program beasiswa daerah Kabupaten Sidoarjo*. https://sidoarjokab.go.id

Reay, D. (2017). *Miseducation: Inequality, education and the working classes*. Policy Press.

Ritzer, G. (2021). *Sociological theory* (10th ed.). McGraw-Hill.

Sinta, N. (2023). Perubahan status sosial masyarakat di wilayah industri Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan, 24*(2), 101–110.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tilak, J. B. G. (2020). Education and inequality in developing countries. *Journal of Education Policy, 35*(3), 1–15.

Tohari, A. (2022). Pendidikan dan mobilitas sosial dalam perspektif pembangunan manusia. *Jurnal Pendidikan Islam, 7*(1), 55–67.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

World Bank. (2020). *The promise of education in Indonesia*. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/the-promise-of-education-in-indonesia